

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)**

AKHIR TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ADONARA BARAT

DESA WUREH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Wureh khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan Akhir Tahun Anggaran 2022 maka di kami wajib membuat laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun. Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Wureh sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah.

Wureh, 24 Juli 2023

Penjabat Kepala Desa Wureh,



BARNABAS LEWOKEDA,S.IP

NIP.19800827.201001.1019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan.....	1
B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	1
C. Strategi dan Kebijakan.....	2

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	3
Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan.....	3
Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	4
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	4
Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.....	5
Program Sektorl Yang Masuk Ke Desa.....	5
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	5
Keberhasilan, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh.....	11

BAB III PENUTUP.....	12
----------------------	----

LAMPIRAN

1. Data Kependudukan Akhir Bulan Desember 2022
2. Rincian Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Desa

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

VISI

Visi Desa Wureh berdasarkan Visi Kepala Desa adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA WUREH YANG MANDIRI, SEHAT,
BERBUDAYA DAN BERSAUDARA”**

MISI

Misi Desa sesuai dengan Misi Kepala Desa adalah :

1. Mengembangkan dan melanjutkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip pelayanan prima melalui Penerapan tata kelola yang profesional, Transparan, sinergis, akuntabel dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan potensi alam yang berlimpah demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya kehidupan yang bebas dari segala macam penyakit dan sikap mental yang tidak sehat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai salah satu identitas kepribadian masyarakat.
4. Memberikan Jaminan Kenyamanan hidup bagi warga masyarakat desa wureh melalui peningkatan iman dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menuju kehidupan yang harmonis dan persaudaraan.

Untuk mencapai sasaran dari misi di atas, maka disusunlah beberapa program kerja dan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Program Fisik :

1. Pembangunan Rabat Jalan Desa Di Dusun C (Tanah Merah)
2. Pembangunan Pemakaman Situs Bersejarah Milik Desa (Kuburan Para Leluhur)

3. Pengerukan Bendungan dan Normalisasi Kali.
4. Pembangunan Pondium
- Program Non Fisik :
 1. Menyediakan dan menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional agar terwujud pelayanan yang maksimal;
 2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, penyiapan fasilitas dan pengelolaan operasional kelembagaan dan menjalin kemitraan dengan stakeholder yang ada di desa;
 3. Melaksanakan Pembinaan keamanan dan ketertiban; pembinaan pemuda dan olahraga; pembinaan PKK, dan pembinaan lembaga adat;
 4. Meningkatkan pengelolaan Posyandu dan PAUD;
 5. Menyelenggarakan musyawarah desa;
 6. Mengelola sistem informasi desa, pendataan penduduk, penyusunan profil desa; perencanaan desa dan administrasi desa;
 7. Meningkatkan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat(Pengadaan Bibit Babi)

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Wureh diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Desa dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

1. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti infrastuktur jalan, pendidikan, kesehatan, olahraga, komunikasi maupun ekonomi;
2. Masih rendahnya kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Masih rendahnya kelembagaan ekonomi desa dan perekonomian masyarakat;
4. Masih rendahnya peran stakeholder dan kapasitas kelembagaan yang ada di desa;
5. Fasilitas akses informasi desa masih berbasis lokal dan belum berbasis teknologi;
6. Terbatasnya pembinaan generasi muda;
7. Tingkatan penyerapan tenaga kerja yang masih rendah
8. Masih adanya data bayi-balita yang berstatus gizi buruk dan Stunting di desa;
9. Kesulitan mengakses air bersih pada saat musim kemarau;
10. Kesejahteraan masyarakat masih rendah;
11. Belum adanya saran infrastruktur penunjang kegiatan usaha pertanian;
12. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistem pemerintahan terbuka yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan. Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan cara terbuka.

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- 1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat;
- 2) Pembayaran Tunjangan Ketua dan anggota BPD
- 3) Kegiatan operasional pekantoran;
- 4) Kegiatan operasional BPD;
- 5) Pembayaran Insentif RT/RW
- 6) Penyusunan / pendataan /Pemutakhiran Profil Desa
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes;
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDES/RKPDes)
- 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (ABPDes, APBDes perubahan, dll)
- 10) Penyusunan Laporan Kepala Desa ,LPP Desa, Dan Informasi Kepada Masyarakat

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, Listrik, dll)

1. Penyediaan Tunjangan BPD
2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana program kerja pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Pembayaran Insentif Guru PAUD/TKK
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
3. Penyelenggaraan posyandu

4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
5. Pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar)

Kesehatan

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; bagi Lansia dan Pralansia, Insentif Bidan Desa/Perawat Desa)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Insentif Kader Posyandu, Insentif KPM)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan Rabat Jalan
2. Pembangunan Podium
3. Pengerukan Bendungan dan Normalisasi Kali

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, berupa Baliho;
2. Insentif Tenaga Operator Komputer dan Pulsa Internet

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana program kerja pembinaan kemasyarakatan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- Pembinaan PKK (Operasional dan Insentif PKK)

Program Kerja Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan PKK (operasional dan insentif PKK)

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Bidang Pemberdayaan yakni Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di sub Bidang Peternakan sebagai berikut ;

- Peningkatan Produksi Peternakan (Pengadaan Bibit Babi, Pakan Ternak dan Obat-obatan.

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan Bencana (Covid-19);
- 2) Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)

Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Penanggulangan Bencana

- 1) Penanggulangan Bencana (Covid-19);
- 2) Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)

F. PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK KE DESA

Program sektor yang masuk ke desa dari kabupaten namun langsung ke kelompok tani pada tahun 2022 yakni ;

- 1) Kelompok Tani Pasti
Sumur Dangkal dengan volume 110m, dengan biaya Rp 150.000.000; Capaian 100%
- 2) kelompok Tani Sinar Baru
Saluran Irigasi dengan volume 100m, dengan biaya Rp 75.000.000; capaian 100%

G. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

a) Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Wureh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wureh Tahun Anggaran 2022, dengan rincian :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp 1.238.608.880;
b. bertambah/(Berkurang)	Rp 1.238.608.880;
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 0;

2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 1.251.348.659;
b. bertambah/(Berkurang)	Rp 1.216.188.347;-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 35.160.312;-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (12.739.779;-)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 12.739.779;
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 14.812.402,45;
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp (27.352.181,45;)
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 12.739.779;
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 12.739.779;
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp (27.352.181,45;)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp 27.352.181.45;-

b) Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Setelah Tahun Anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa Wureh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, *dengan rincian*

1. Pendapatan Desa	Rp 1.238.608.880;
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 360.927.211;
b. Bidang Pembangunan	Rp 445.310.698;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 7.704.000;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 74.636.750;
e. Bidang Tak Terduga	Rp 362.770.000;
Jumlah Belanja	Rp 1.216.188.347;
Surplus/Defisit	Rp 35.160.312;

2. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.739.779;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	12.739.779;
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0,00;

c) Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Wureh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wureh Tahun Anggaran 2022. Kemudian dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Wureh nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wureh Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

1) **Pendapatan Desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenaan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Tabel 1. Pendapatan Desa

NO	URAIAN	TARGET(Rp)	REALISASI (Rp)
4	PENDAPATAN	1.238.608.880;	1.230.800.749.45
4.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<i>15.480.000;</i>	<i>7.579.000;</i>
4.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Desa	15.480.000;	7.579.000;
4.1.4.01	Hasil Pengutan Desa	15.480.000;	7.579.000;
4.2	<i>Pendapatan transfer</i>	<i>1.223.128.880;</i>	<i>1.230.800.749,45;</i>
4.2.1	Dana Desa	893.480.000;	893.480.000;
4.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	6.758.240;	6.758.240;
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	322.890.640;	321.806.428;
4.2.5	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten</i>	0;	0;
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	0;	0;
4.3	Pendapatan Lain - Lain	1.177.081,45;	1.177.081.45;
4.3.6	Bunga Bank	1.177.081,45;	1.177.081.45;

2. **Belanja Desa**

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan

yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKP Desa.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

*Tabel 2.
Belanja Desa*

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
5	BELANJA	1.017.924.914;	1.006.727.842,96
1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>360.927.211;</i>	<i>328.137.899;</i>
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	330.278.659;	303.019.347;
1.1.2	Operasional Kantor Desa	10.629,779;	10.743.279;
1.1.6	Operasional BPD	2.516.240;	2.516.240;
1.1.7	Insentif RT/RW	8.430.000;	8.430.000;
1.3	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</i>	<i>10.762.552;</i>	<i>10.762.552;</i>
1.4.1	Penyelenggara Musyawara Perencanaan Desa	3.211.000;	3.211.000;
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.825.000;	3.825.000;
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	535.000;	535.000;
1.4.7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD & LKPPD	5.530.000;	0;
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & sosialisasi BPD & Kepala Desa	6.785.000;	6.785.000;
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	<i>445.310.698;</i>	<i>445.310.698;</i>
2.1.1	Penyelenggara Paud/TKK	23.212.500;	23.212.500;
2.2.1	Penyelenggara Pos Kesehatan Desa	30.708.550;	30.708.550;
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	90.430.000;	90.430.000;
2.3.10	Pembangunan Rabat Jalan Desa	54.422.004;	54.442.004;
2.3.16	Pembangunan Pemakaman Para Leluhur Desa	22.370.600;	22.370.600;
2.3.19	Pembangunan/Pengerukan Bendungan	55.000.000;	55.000.000;
2.4.3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	9,600.000;	9.600.000;
2.6.2	Penyelenggara Informasi publik Desa	4.600.000;	4.600.000;

2.63	Pembuatan dan pengelolaan Jaringan Internet	19.600.000;	19.600.000;
2.8.2	Pembangunan Podium	135.367.044;	135.367.044;
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.704.000;	5.333.000;
3.4.3	Pembinaan PKK	7.704.000;	5.333.000;
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	74.636.750;	74.636.750;
4.6.2	Pelatihan Pengolahan BUMDesa	74.636.750;	74.636.750;
5	Bidang Tak Terduga	362.770.000;	362.770.000;
5.1.0	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.770.000;	2.770.000;
2.5.2	Kegiatan Keadaan Mendesak	360.000.000;	360.000.000;

3. Jumlah Belanja

Dari total item belanja sebesar Rp1.216.188.347; terdiri dari 5 sub belanja yang dapat diketahui secara presentase antara lain :

- ❖ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : 95,5 %
- ❖ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : 100 %
- ❖ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : 75 %
- ❖ Bidang Pemberdayaan Masyarakat : 100 %
- ❖ Bidang Tak Terduga : 100 %

4. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 3.
Pembiayaan Desa

NO	URAIAN	Target(Rp)	Realisasi(Rp)
3	PEMBIAYAAN	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	12.739.779;	12.739.779;
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	12.739.779;	12.739.779;

	Sebelumnya (SILPA)		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.739.779;	12.739.779;
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan	0,00	0,00;
3.2.2	Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes	0,00	0,00;
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	
	Lebih/Kurang Pembiayaan	0;	0;

❖ **PENETAPAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)**

Karena adanya potensi penghematan belanja dan adanya sisa dan yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun, maka terjadi penetapan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA tahun 2022). Dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja dapat ditentukan besarnya SILPA yakni sebagai berikut :

- Target Pendapatan : Rp. 1.238.608.880;
- Realisasi Pendapatan : Rp. 1.230.800.749,45;
Rp 7.808.130,55;

- Target Belanja : Rp. 1.251.348.659;
- Realisasi belanja : Rp 1.216.188.347;
Rp 35.160.312;

- SURPLUS/(DEFISIT) : Rp (12.739.779;)
- Realisasi : Rp 14.612.402,45;
Rp (27.352.181,45;)

- Pembiayaan : Rp 12.739.779;
- Penerimaan Pembiayaan : Rp 12.739.779;
Rp. 0;

Silpa Tahun Berjalan : Rp 27.352.181,45

G. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wureh, dapat diurai dalam tabel di bawah ini :

BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa.	1. Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa.	1. Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola
	2. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.	2. Terlambat dan Rendah Penerimaan PADesa dan Kurangnya Pos Anggaran Operasional Pemerintah Desa.	2. Penyediaan Anggaran Operasional Pemerintah Desa.
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan	Masih Rendahnya Pemahaman Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.	Penyediaan Pos Anggaran Pelayanan Dasar Kesehatan.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Peningkatan Insentif /Honor Lembaga Desa.	Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa.	Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terciptanya SDM Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa.	Kurangnya pemahaman Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan.
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa.	1 Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2020	1 Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan an Bencana
	1 Kegiatan Mendesak Desa.	1 Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2021	1 Penyaluran BLT DD

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam pasal 8 ayat (1) "*Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran*". Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran ini memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan dan pertanggungjawaban adalah bagian terakhir dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terkhususnya siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini, yaitu :

1. Dasar tujuan pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun;
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Wureh;
3. Pelaksanaan Program kegiatan Desa Wureh tahun anggaran 2022;
4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wureh tahun anggaran 2022;
5. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

2. Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wureh yang telah bekerja sama dan berperan aktif bersama Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2022 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang dengan caranya turut berpartisipasi baik dalam pembangunan desa di tahun anggaran 2022 ini, maupun dalam memberikan masukan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan kami. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada unsur yang terlibat dalam membantu menyelesaikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Wureh akhir Tahun Anggaran 2022.

3. Saran

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Menteri desa dan Menteri Keuangan, yang menginginkan Desa agar cermat dan cepat dalam penyerapan anggaran, maka kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten agar lebih cepat dalam menetapkan pagu Indikatif agar Desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Agar tercapainya target penerimaan desa dari PADes, maka kami menyarankan kepada BPD Wureh untuk bersama memikirkan; menyusun dan membentuk Peraturan Desa.
3. Seiring dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, dan demi kelancaram dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka kami mengajak semua stakeholder dan terkhususnya aparatur Desa agar lebih memperhatikan kedisiplinan; perubahan mentalitas; dan fokus dalam menjalankan tugasnya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan evaluasi.

Desa Wureh, 24 Juli 2023

Penjabat Kepala Desa Wureh



BARNABAS LEWOKEDA S.IP

NIP: 19800827 201001 1 019

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**A.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	BANYAKNYA/ JUMLAH
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-Undangan	a. Peraturan Desa	8
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	16
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	
		1) Laki-Laki	348
		2) Perempuan	347
		3) Jumlah Kepala Keluarga	180
		4) Jumlah Anggota Keluarga	509
		5) Jumlah Jiwa	695
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
		1) Pendidikan Umum	133
		2) Pendidikan Khusus	27
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
		1) PNS	6
		2) TNI	2
		3) Swasta	-
3.	Pertanahan	a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	179
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	2
		b. Luas Tanah:	425 ha/m2
		1) Bersertifikat	-
		2) Belum Bersertifikat	-
		3) Tanah Kas Desa	-
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	-
		2) Tanah Ladang	-
		3) Bangunan Umum	6400m2
		4) Perumahan	72800 m2
5) Ruang Fasilitas Umum	-		
d. Tanah Yang Belum Dikelola			
1) Hutan	-		
2) Rawa-Rawa	-		

4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	10
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrenbangdes	2
5.	Ketentraman Dan Ketertiban	e. Musyawarah BPD	2
		a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	4
		2) Alat Pemadam Kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman Dan Ketertiban	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	-
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1) RT/RW – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – (ada/tidak)	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga Kemasyarakatan Membantu Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat – Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dan Sebagai Mitra Pemerintah Desa – Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan Diikutsertakan Dalam Pelaksanaan Program Sektor Dan Program Pemerintah Daerah – Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat - Ada/Tidak	Ada

4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	10
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrenbangdes	2
5.	Ketentraman Dan Ketertiban	e. Musyawarah BPD	2
		a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	4
		2) Alat Pemadam Kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman Dan Ketertiban	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	-
5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-		
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1) RT/RW – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – (ada/tidak)	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga Kemasyarakatan Membantu Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat – Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dan Sebagai Mitra Pemerintah Desa – Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan Diikutsertakan Dalam Pelaksanaan Program Sektor Dan Program Pemerintah Daerah – Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat - Ada/Tidak	Ada

		f. Lembaga Adat Dibentuk Dengan Peraturan Desa Terpisah Dengan Lembaga Kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya
--	--	--	----

A.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ADA/TIDAK ADA – YA / TIDAK
1	2	3	4
1.	Sarana Dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	1,5 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	2 km
		e. Jembatan (Buah)	3
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan	
		Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	-
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5) Akademi (Jumlah)	-
		6) Institute/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2) Madrasah (Jumlah)	-
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
5) Kursus-Kursus (Jumlah)	-		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		h. Puskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya	a. Sarana Olahraga :	
		1) Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2) Lapangan Khusus (Jumlah)	-
		b. Sarana Kesenian /Kebudayaan:	
		1) Gelanggang Remaja	-

		(Jumlah)	
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3) Gedung Teater (Jumlah)	-
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial:	
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	-
		3) Panti Wordo (Jumlah)	-
		4) Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi:	
		1) Radio komunitas	-
		2) Papan Pengumuman (Jumlah)	1
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat Atau Pengembangan (Jumlah)	-
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	-
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	1
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	-
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	5

A.3. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ADA/TIDAK ADA – YA / TIDAK
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa :	
		1) Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri Mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2

		2) Sosialisasi Peraturan Bupati / Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	2
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat Memperoleh Informasi Dan Pelayanan Yang Adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat Mendapatkan Perlindungan Dari Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat Berpartisipasi Dalam Berbagai Kegiatan Di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Mengenai Pengembangan Olahraga Dan Kesenian (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi Mengenai Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	2
		d. Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	-
		e. Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba Dan Kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi Mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	-
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-

		e. Remaja Masjid (Jumlah)	-
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	1
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja Keluar Negeri (Jumlah)	-

A.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ADA/TIDAK ADA – YA / TIDAK
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	5
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	5
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	2
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

NO URUT	NAM A DUS UN	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN						TAMBAHAN BULAN INI						PENGURANGAN BULAN INI						JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN						KET						
		WNA		WNI		JLH KK	JLH ANG GOT A KEL UAR GA	JLH JIW A	LAHIR		DATANG		MENINGGAL		PINDAH		WNA		WNI		JLH KK	JLH ANG GOT A KEL UAR GA	JLH JIW A									
		L	P	L	P				WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	L	P				L	P							
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	DUS UN I			134	123	73		257	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	124	73		258	
2	DUS UN II			126	123	73		249	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	127	121	73		248		
3	DUS UN III			89	98	40		187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	89	97	40		186		
	JLH PEN DUD UK			350	346	186		693	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	350	342	186		692		

KEPALA DESA WUREH,


BARNABAS LEWOKEDA S.IP
NIP: 19800827 201001 1 019